

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong)**

Tuti Hermelinda
Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia Rejang Lebong

ABSTRAK

This study aims to find out and obtain empirical evidence regarding the influence of HR competencies, utilization of Information Technology and Understanding of Regional Financial Administration on the quality of the financial statements of the Rejang Lebong district government.

The research was conducted on all officials of the financial administration of the OPD of Rejang Lebong Regency using primary data obtained from questionnaires distributed to respondents. Determination of the sample through purposive sampling and obtained a sample of 144 respondents. Data analysis using multiple regression and hypothesis testing.

The data quality test results show that all research instruments are valid and reliable and the model used is appropriate to explain the dependent variable. The results showed that HR competence, utilization of Information Technology and understanding of Regional Financial Administration had a positive influence on the quality of financial statements both partially and simultaneously

Keywords: Quality of financial statements, HR competency, Information Technology Utilization and Understanding of Regional Financial Administration.

1. Pendahuluan
Latar Belakang

Reformasi dibidang pemerintah daerah menjadi landasan utama dilakukannya reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar dilakukannya reformasi tersebut. Kedua undang-undang ini membawa perubahan yang sangat besar dalam hubungan Tata Pemerintaham dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang terkandung pada undang-undang tersebut adalah dalam hubungannya dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi, dimana salah satu upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tersebut adalah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (PP 71, 2010).

Kualitas LKPD dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, serta penatausahaan keuangan daerah (Andini, (2015); Yunus Madika, (2015); Ni Made Sudirianti, (2015); Hairul, (2012); Irwan, (2011); Ernasari, (2013); Julianet, (2013). SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Sudarmanto, 2009:76). Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014) dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku (Irwan, 2011) SDM yang bersangkutan. Sementara itu, Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan sistem informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005. Pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM juga berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan daerah yaitu penatausahaan keuangan daerah. Pada setiap OPD sebagai pengguna anggaran terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) yang tugasnya melakukan verifikasi, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan. (Darise, 2008), mereka haruslah memiliki pemahaman yang memadai sehingga mampu menghasilkan LKPD yang berkualitas.

Menurut Abdul Halim (2011), Pemahaman Penatausahaan keuangan daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari pengurusan keuangan yang dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan, belum seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan gejala-gejala sebagai berikut: (1) Masih terdapat kesalahan-kesalahan pencatatan pada buku kas umum; (2) Terlambatnya pengiriman SPJ yang menyebabkan kelancaran penyediaan dana pada unit kerja sering terhambat, penatausahaan pada bagian keuangan tidak tepat waktu; (3) Pengendalian keuangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena data keuangan belum siap setiap dibutuhkan, dalam arti angka-angka yang tertera didalam buku belum tentu benar.

Obyek penelitian ini adalah Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu kabupaten yang pada hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 untuk LKPD tahun 2015 memperoleh opini WDP, berdasarkan data IHP BPK bahwa Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP ini bukan merupakan suatu hasil yang maksimal serta mengindikasikan bahwa masih banyak kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang perlu diperbaiki (Indriasih, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul pada penelitian ini yaitu **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Rejang Lebong?
3. Apakah Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Rejang Lebong ?

2. LANDASAN TEORI

Kualitas laporan keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Kualitas pelaporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna (Jonas dan Blanchett, 2000). Laporan keuangan dalam penelitian ini dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 tahun 2010. PP Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan. Menurut Arniati dkk. (2010) Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Teknologi Informasi

Teknologi merupakan mesin untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpanan data diluar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*) (Bodnar, 2010).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Fungsi teknologi informasi yaitu mengumpulkan data, pengolah data, pelaporan data, penyimpanan data dan pengiriman data.

Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Peraturan mengenai penatausahaan keuangan daerah mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Pemkab Rejang Lebong

Penelitian Roviyanti (2011) menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Penelitian mengenai kompetensi SDM, terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah juga pernah dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004); Indriasari dan Nahartyo (2008); Winidyaningrum dan Rahmawati (2010); Indriasih (2014), Wartini (2015) dan Ni Made Sudirianti (2015). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara kompetensi SDM dengan kualitas LKPD, sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H1: Kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas LKPD Kabupaten Rejang Lebong

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas LKPD Pemkab Rejang Lebong

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa, untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan Menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka semakin baik pemanfaatan teknologi informasi akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Indriasari dan Nahartyo (2008) mengatakan bahwa penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Hasil penelitiannya juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Berdasarkan hasil penelitian Winidyaningrum & Rahmawati (2010), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Madika (2015), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif pada kualitas LKPD kabupaten Rejang Lebong

Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap kualitas LKPD kabupaten Rejang Lebong

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas umum penatausahaan keuangan daerah; (b) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (c) penatausahaan penerimaan; dan (d) penatausahaan pengeluaran.

Menurut Ernasari dkk (2013) pemahaman penatausahaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja pengelola keuangan daerah. Penelitian Julianet Farrah (2014) mengenai pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan menyimpulkan bahwa Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Menurut Nurlan Darise dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah

(2009:18) keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka diduga terdapat hubungan positif antara pemahaman penatausahaan keuangan daerah terhadap kualitas LKPD kabupaten Rejang Lebong dengan hipotesis sebagai berikut:

H3: Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD kabupaten Rejang Lebong

3. METODE PENELITIAN

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dihitung berdasarkan hasil dari kuisioner yang berasal dari jawaban responden. Jawaban dari responden diberi skor atau nilai berdasarkan skala likert yang terdiri dari sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas dan tidak puas sedangkan untuk pendapat responden yaitu dengan skala likert yang terdiri dari sangat setuju, setuju, cukup, kurang setuju dan Sangat tidak setuju (Sekaran, 2006: 31).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah didalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian multikolinearitas, heteroskedasitas, auto korelasi dan uji normalitas.

Regresi Linear Berganda

Analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen digunakan rumus menurut Sugiyono(2013) sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas LKPD

a = Konstanta

$b_1b_2b_3$ = Slope yaitu koefisien kecondongan garis

X_1 = Kompetensi SDM

X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_3 = Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah

e = Error

Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan koefisien regresi antara variabel-variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y)

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi model atau besarnya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari koefisien determinasi.

Uji F

Uji F test digunakan untuk mengetahui besarnya dampak atau pengaruh nyata dalam variabel independen (X_1) dan (X_2) terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Uji Regresi****Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.673	3.207		0.210	0.834
Kompetensi SDM	0.462	0.114	0.357	4.068	0.000
Pemanfaatan TI	0.621	0.144	0.378	4.312	0.000
Pemahaman Penatausahaan	0.133	0.078	0.106	1.709	0.090

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh bahwa persamaan model regresi dalam penelitian ini yaitu $Y = 0,673 + 0,357X_1 + 0,378X_2 + 0,106X_3$. Persamaan ini menunjukkan bahwa peningkatan masing-masing variabel X_1 , X_2 , dan X_3 akan meningkatkan variabel Y dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini berarti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah, dan akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Rejang Lebong dengan ditunjukkan koefisien bernilai positif. Persamaan regresi tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau semakin baik kompetensi sumber daya manusia daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman penatausahaan keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga semakin baik.

Hasil Uji F**Tabel Hasil uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2839.159	3	946.386	55.049	.000 ^a
Residual	2406.834	140	17.192		
Total	5245.993	143			

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan kurang dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan pada tingkat kepercayaan 95% model regresi dalam penelitian ini dinyatakan signifikansi dan layak. Selain itu hasil ini juga menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen (kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman

penatausahaan keuangan daerah) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) di Kabupaten Rejang Lebong.

Hasil Uji Adjusted (R^2)

Tabel Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	0,736	0,541	0,531	4,14628

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas ouput hasil uji regresi linear berganda diketahui bahwa nilai $R^2 = 0,531$. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh setiap variabel independen, yaitu kompetensi SDM, Teknologi Informasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap variabel dependen yaitu kualitas LKPD adalah sebesar 53,1 % sedang sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar yang diteliti oleh penulis.

Hasil Uji t

Tabel Hasil uji t

Variabel	B	Std Error	Nilai t	Sig	Hipotesis
Kompetensi SDM	0.357	0,065	4.068	0.000	Diterima
Pemanfaatan TI	0.378	0,115	4.312	0.000	Diterima
Pemahaman Penatausahaan	0.106	0,154	1.709	0.090	Diterima

Sumber: Output SPSS

Hasil analisis uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada variabel penerapan kompetensi sumber daya manusia daerah nilai t sebesar 4,068 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti variabel kompetensi sumber daya manusia daerah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, pada variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai t positif yaitu sebesar 4,312 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan t positif sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil uji t berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada variabel Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah menunjukkan nilai t positif yaitu sebesar 1,709 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rejang Lebong

Hasil analisis dalam penelitian ini yang menyatakan pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan hasil penelitian Arsyiati (2008) yang menyatakan bahwa pengaruh SDM mempunyai pengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dibuktikan Widiastuti (2013) dan Yuliarta (2013) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM dibidang akuntansi dan Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai LKPD.

Penelitian Rahmawati (2010) menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan. Hal ini disebabkan kondisi pegawai bagian keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Syafarudin alwi, M.S (2008), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia adalah sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dibuktikan Ruri Widiastuti (2013) dan Yuliarta (2013) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM dibidang akuntansi dan Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LKPD kabupaten Rejang Lebong.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rejang Lebong

Jika melihat hasil analisis, sistem informasi akuntansi keuangan daerah terukur oleh tersedianya teknologi, pemanfaatan teknologi informasi, serta akses teknologi informasi. Di sisi lain, laporan keuangan daerah berkualitas tinggi jika laporan keuangan tersebut memiliki tingkat relevansi yang tinggi, memiliki kehandalan tinggi, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Semakin baik sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang terlihat dari ketersediaan teknologi yang baik, tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi, serta baiknya akses teknologi informasi akan mengakibatkan laporan keuangan yang tersusun akan semakin baik yang ditandai dengan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Selain itu hal ini juga dapat diartikan bahwa semakin maksimal pejabat keuangan OPD dalam hal ini adalah PA, KPA, PPTK dan Bendahara dalam memanfaatkan teknologi informasi, maka akan semakin baik dan berkualitas pula laporan keuangan yang akan dihasilkan. Dengan kemajuan teknologi dan informasi (*information technology/IT*) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan tetap mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sehingga ketidakmampuan menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi mulai dari data aset, anggaran, gaji, serta proses penatausahaan dapat dihindari dan mampu menghasilkan LKPD baik neraca,

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani ; (2015);Madika (2015); dan Anita (2012) yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh yang positif antara teknologi informasi terhadap laporan keuangan daerah. Laporan keuangan yang baik dapat disusun jika ketersediaan informasi keuangan yang cukup dan akurat.

Pengaruh Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rejang Lebong

Jika menilik hasil analisis, penatausahaan keuangan daerah terukur oleh penerapan azas-azas penatausahaan keuangan daerah, Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Semakin baik pemahaman pejabat penatausahaan keuangan daerah dalam hal ini adalah PA, KPA, PPTK dan Bendahara akan mengakibatkan laporan keuangan yang tersusun akan semakin baik yang ditandai dengan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Dengan demikian pemahaman yang baik mulai dari tata usaha umum sampai dengan tata usaha keuangan akan mendukung dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini didukung oleh pendapat Mahmudi (2011) yang menyebutkan penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Sehingga penatausahaan yang baik akan mendorong pengelolaan keuangan yang baik. Selain penatausahaan keuangan daerah juga tidak terlepas dari tahap-tahap dari hulu hingga ke hilir, dimana disetiap tahap dibutuhkan pemahaman yang memadai dari pegawai penatausahaan keuangan yang ada disetiap OPD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Farah (2014); Ernasari dan Aprila (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif pemahaman penatausahaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin tinggi pemahaman pegawai terhadap penatausahaan maka semakin baik penyusunan laporan keuangan.

5. KESIMPULANDAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penerapan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Rejang Lebong sehingga semakin baik penerapan kompetensi sumber daya manusia pada pegawai di Kabupaten Rejang Lebong maka akan mendukung kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin berkualitas laporan yang disusun.
3. Pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga semakin baik pemahaman pegawai pengelola keuangan daerah terhadap penatausahaan keuangan daerah maka semakin baik pegawai tersebut dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Saran

1. Kepada pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah, guna memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik, tetap mengaktifkan Sistem Pengendalian Interendengannya baik, serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang tinggi, dengan mengikutsertakan pengawaidalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan keuangan daerah.
2. Kepada pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong, diharapkan dapat memberikan penghargaan kepada pegawai teladan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang bebas dari temuan audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Ugun, (2012). *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Pemerintah Daerah*. Jurnal akuntansi. (Tahun 2012. Mei. No 1 Vol.12)
- Andini, Dewi, Yusrawati (2015). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. (Juni 2015 Vol.24 No.1)
- Arniati, Imelda dan Ely Kartikangdyah. (2010). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Terhadap Singkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwakerto.
- Arsyanti, Darwanis MA Djalil (2008). *Pengaruh sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan*. (tesis)
- Bodnar, H.G. dan Hopwood, W.S. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku I. Edisi Ke-6. Penerjemah Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjiptoherijanto, 2001 dan Alimbudiono & Fidelis, 2004 dalam Celviana dan rahmawati (2010) *.Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan variable intervening pengendalian Intern akuntansi. (studi empiris di Pemda Subosukowonosraten)*
- Darise. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. PT. Indeks.
- Ernasari, Syaiful, Aprila, Nila (2013). *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah* Jurnal Fairness. (Tahun 2013 Volume 3 Nomor 3.)
- Hairul Mohamad (2012). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Teknologi Informasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Artikel Ilmiah. Universitas Gorontalo

- Halim Abdul. (2011). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi seri bunga rampai Manajemen keuangan Daerah: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Irwan, D. (2011). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat*. Tesis tidak dipublikasikan. Yogyakarta. Universitas Gajahmada.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. (2008). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. *Kumpulan Artikel Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI Pontianak*
- Indriasih, D. (2014). *The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government*. *Research Journal of Finance and Accounting*. (Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847)
- Jonas, G. J. dan Blanchet. J. (2000), Assessing Quality of Finacial Reporting. *Accounting Horizons*, September 14,3; Pg.353.
- Julianet Farrah (2013). *Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya Kualitas Informasi Keuangan Pada BPKAD Pemda Papua*. *Jurnal Akuntansi*. Unversitas Komputer Indonesia.
- Mahmudi (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Ull Press
- Madika, Yunus (2015). *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis tidak dipublikasikan. Makassar. Universitas Hasanudin
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*
- _____ (1999). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- _____ (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- _____ (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*
- _____ (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____ (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- _____ (2004). *Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- _____ (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*
- _____ (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- _____ (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi*
- _____ (2006). *Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

- _____ (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- _____ (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- _____ (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Roviyantie, Devi. (2012). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah"(survey pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.
- Sudiarianti, Ni Made (2015). *Pengaruh Kapasitas Sumber Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*Tesis tidak dipublikasikan. Bali Universitas Udayana
- Syafarudin alwi.(2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif.* No.008. Yogyakarta.
- Sudarmanto, (2014). *Kinerja dan pengembangan Kompetensi SDM : Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam organisasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Windiastruti Ruri, (2013). *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas lapaoran keuangan Pemerintah Daerah(studi kasus pada DPKAD Kota Bandung)*
- Warisno 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi*
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati, (2010) *Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variable intervening pengendalian intern akuntansi (studi empiris di Pemda Subosukaweonostraten)*
- Wartini, Ni Nengah (2015). *Analisis Efektifitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana.* Tesis. Tidak dipublikasikan. Universitas Udayana. Denpasar
- Yuliarta (2013).*Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Padang)*
- Yosefrinaldi (2011) *Pengaruh Kapasitas Sumber daya manusia dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Intern Pemetintah (studi empiris pada DPKAD se- Sumatera Barat)*